



Rizal Ramli Laporkan KPK
Dugaan Korupsi
Impor Pangan

JAKARTA-RK. Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemitraan Rizal Ramli mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (23/10).

[Baca Hal... 7](#)

Dia membawa segepok berkas berisi persoalan pangan yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2017. Data-data itu diserahkan kepada KPK dalam bentuk laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).

Rizal diterima Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan sejumlah pejabat direktorat penelitian dan pengembangan (litbang) serta kedepuitan penindakan. Di pertemuan itu, Rizal memaparkan beberapa indikasi kelebihan impor pangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. "Kami laporkan adanya dugaan tindak

pidana korupsi dalam impor pangan," ujar Rizal usai bertemu pejabat KPK.

Pertama, pria yang pernah masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menyebut kesengajaan impor garam 1,5 juta ton yang ramai beberapa waktu lalu. Nilai kotor kelebihan impor itu sebesar Rp 3 triliun bila harga rata-rata garam Rp 2.000 per kilogram. Kelebihan impor itu sempat disebut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tak sesuai rekomendasi.

Bukan hanya itu, Rizal juga membawa laporan berupa hasil audit



Dugaan Korupsi Impor Pangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester I 2017. Dalam laporan itu disebutkan adanya dugaan pidana atas pemberian persetujuan impor beberapa komoditas pangan.

Misal, pemberian persetujuan impor gula kristal putih tahun 2015 hingga semester I 2017 sebanyak 1.694.325 ton. Impor itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Diduga hal tersebut (impor gula, Red) dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Ada pula impor gula kristal mentah sebanyak 108.000 ton yang bertentangan dengan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Impor tersebut diduga dilakukan tanpa didukung analisis kebutuhan.

Selain garam dan gula, Rizal juga melaporkan dugaan penyimpangan dalam impor beras kukus tahun 2016 sebanyak 200 ton. Serta, impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada 2015 dan impor sapi tahun 2016 sebanyak 97.100 ton. Impor-impor itu diduga dilakukan tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. "Tidak didasarkan pada hasil keputusan rapat koordinasi," terangnya.

Rizal meminta KPK fokus pada dua hal. Pertama, kerugian negara bila yang membeli adalah negara atau lembaga negara. Kedua, fokus pada kerugian ekonomi negara. Sebab, dengan dilakukan impor yang bertele-

bihan, petani sangat terdampak. "Seandainya uang itu tidak dipakai impor, petani kita hidupnya akan lebih baik," paparnya.

Lantas bagaimana tanggapan KPK? Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan pihaknya juga memberikan informasi soal kajian KPK seputar pangan dalam per-temuan kemarin. Kajian itu sudah sejak lama dilakukan KPK, khususnya Direktorat litbang. "Terkait materi pengaduan biasanya bersifat rahasia," kata Yuyuk. **(Jawa Pos/JPJ)**